

## Hukumnya Haram...

Hukumnya haram!", begitu kata Aa Hadi, seorang ustadz yang masih muda, berwawasan luas dan penuh humor ini menjelaskan kepada sekitar seratus lebih peserta di café Arios di Hotel Ambhara, Jakarta, dalam acara "Pro-Kontra Poligami", yang diadakan oleh majalah tabloid Wanita Indonesia baru-baru ini. Aa Hadi yang mengingatkan orang akan Aa Gym, karena pakaiannya yang sama persis, memang memberikan sebuah harapan baru dalam melihat teks Islam soal poligami yang sedang diributkan banyak kalangan perempuan. "Mengapa perempuan harus ribut-ribut soal sepele ini?" tukas seorang "praktisi" (ia tidak mau disebut pelaku) poligami. Dede Yusuf, artis kondang bergaya keren juga tidak kalah menimpali bahwa seharusnya yang diributkan oleh para kelompok perempuan adalah bukan soal poligami tapi soal kekerasan domestik, "soal kekerasan yang diributkan saya setuju tapi bukan soal poligami!". Namun, ketika Muthia Kasim sebagai moderator menanyakan pertanyaan yang cerdas tentang kesediaannya memberikan ijin bila salah satu anaknya (anak Dede Yusuf keduanya perempuan) diminta oleh pria yang telah beristri untuk dinikahkan, Dede tampak gugup dan tidak memberikan jawaban yang jelas.

Bagi Jurnal Perempuan masalah poligami adalah masalah yang serius dan karena itu wajar saja bila banyak kaum perempuan yang meributkan soal ini. Kita harus ingat bahwa separuh lebih penduduk Indonesia (51%, data BPS 2000) adalah perempuan. Oleh sebab itu, kepentingan perempuan yang mayoritas ini menjadi kepentingan yang patut didengarkan. Suara menentang poligami telah secara lantang disuarakan oleh para perempuan sejak tahun 1911 dimulai dengan Kartini, seorang pahlawan nasional. Tahun 1928 Kongres Perempuan pertama juga menuntut larangan poligami, tahun 1930 kelompok Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia menyerukan hal yang sama. Tahun 1954 masalah poligami kembali ramai ditentang sebagian besar perempuan Indonesia ketika Sukarno mengawini Hartini. Nani Suwondo dari Perwari mendukung Fatmawati untuk meninggalkan istana. Belajar dari masa lalu "ibu-ibu" kita yang aktif berdemonstrasi menegakkan hak-hak mereka sebagai perempuan, tentu kita sebagai "anak" perempuan mereka akan melanjutkan cita-cita mereka, terutama ketika ada laki-laki bernama Puspo Wardoyo yang memiliki restoran "Ayam Bakar Wong Solo" berani mengadakan acara "Poligami

Award”, sebuah tamparan keras untuk kaum perempuan dan teriakan protes pun menggema di jalanan sepanjang acara tersebut.

Menarik menyimak artikel di Jurnal Perempuan edisi ini adalah kaitan antara poligami dan kekerasan terhadap perempuan (lihat tulisan Vony Reyneta), yang menganalisa data-data 3 tahun terakhir dari LBH APIK Jakarta. Tercatat 70 orang telah mengadukan suaminya menikah lagi dan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada pihak korban berupa tidak diberi nafkah, ditelantarkan bahkan sampai penganiayaan. Data- data kekerasan ini menjadi penting untuk diperlihatkan kepada publik bahwa poligami tidak dapat ditolerir dan lebih banyak merugikan perempuan. Oleh sebab itu di negara-negara Islam seperti Turki, Siria dan Tunisia, poligami dilarang. Mantan presiden Tunisia Habib Bu Ruqayba secara tegas menolak praktek perkawinan poligami sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dalam abad ke 20 ini. Baginya, “keluarga adalah tonggak masyarakat, dan keluarga dapat berhasil dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antar pasangan.

Salah satu bentuk untuk saling menghormati dan menghargai adalah dengan melaksanakan pernikahan monogami.” Ada hal yang menarik di sini yang mengkaitkan pernikahan monogami dengan pembinaan keluarga yang sehat, artinya berusaha menyelamatkan masa depan anak-anak dengan cara membiarkan mereka tumbuh dalam rasa aman, percaya diri dan dari konflik-konflik keluarga yang menimbulkan trauma. Pada akhirnya, argumentasi kepentingan anak adalah argumentasi mutlak yang harus diterima karena anak adalah aset bangsa yang tidak ternilai, tidakkah para pemimpin bangsa ini menyadari akan hal ini? Kelihatannya mereka tidak sadar karena mereka asyik melakukan praktek poligami, melanggar hukum perkawinan (PP 10) dengan tenang dan aman tanpa rasa malu, risih dan tanpa menyadari bahwa mereka adalah pejabat-pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh kepada anak bangsa! (Gadis Arivia).